

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Analisis Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya

Diana Hertati

*Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur*

e-mail: dianahertati.dh@gmail.com

ABSTRACT

The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries' policy towards coastal and ocean regional development have been based on ecological considerations. The government has made various efforts to encourage the utilization of coastal and ocean funds, utilization patterns that are destructive and conserving coastal and marine resources are still continuing, efforts are needed to try to develop tourism that is developed to preserve the environment. The research method used is descriptive with qualitative studies. Data analysis was performed using qualitative analysis. The results of the study, agreed on the interaction between governance domains in the management of the Wonorejo mangrove ecotourism area with standard procedural requirements that have involved participation and pay attention to community needs and the consultation process, as well as dialogue involving the government and stakeholders. Accountability for managing Wonorejo Mangrove Ecotourism by applying aspects of education and the environment is still hampered by the existence of resources needed by civil society.

Keywords: *tourism, sustainable development, coastal, ecotourism*

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan didasarkan pemikiran bahwa wilayah pesisir dan laut secara ekologis dan ekonomis potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan, pola pemanfaatan yang sifatnya merusak dan mengancam kelestarian sumber daya pesisir dan laut masih saja terus berlangsung, diperlukan upaya yang serius untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk melestarikan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, transparansi dalam interaksi antar domain governance dalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove Wonorejo dengan telah terlaksana standard procedural requirements yakni melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta consultation processes, dimana terdapat dialog antara pemerintah dengan stakeholder. Akuntabilitas pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo dengan mengaplikasikan aspek edukasi dan lingkungan masih terhambat oleh adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki masyarakat sipil.

Kata Kunci: *pariwisata, pembangunan berkelanjutan, pesisir, ekowisata*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan kuat dapat dijadikan kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan sumberdaya yang ada, masyarakat, serta pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan atau pariwisata (Satria 2010). Selanjutnya Yoeti (2016, 16) menjelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata harus memperhatikan komponen-komponen tertentu yang bermanfaat bagi keberhasilan pengembangan pariwisata, yang meliputi tiga unsur inti yang harus dimiliki yaitu: 1) Aksesibilitas seperti bandara, pelabuhan, terminal, jalan raya, jembatan, telekomunikasi, atau transportasi, pembangkit tenaga listrik dan persediaan air bersih, 2) Semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, toko souvenir, bank, dan money changer. 3) Semua objek dan atraksi yang tersedia sebagai daya tarik, termasuk *natural resources*, *cultural resources*, *theme parks*, *sport activities* dan *events*. Atraksi harus memenuhi tiga syarat yaitu apa yang dapat dilihat (*something to see*); apa yang dapat dilakukan (*something to do*); dan apa yang dapat dibeli (*something to buy*).

Menurut Damanik dan Weber (2011) ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menarik perhatian besar terhadap kelestarian sumber daya pariwisata. Ciri khas dari ekowisata adalah kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Munculnya konsep ekowisata (*ecotourism*) sebagai akibat meningkatnya jumlah pengunjung tempat wisata yang kemudian mengurangi keasrian dari tempat-tempat wisata tersebut. Hal ini sebagaimana data pengunjung yang diperoleh dari *Mangrove Information center* (MIC), pada tahun 2014 wisatawan mancanegara sebanyak 185 dan wisatawan nusantara sebanyak 157.411 orang, tahun 2015 wisatawan mancanegara sebanyak 770 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 26.525 orang, dan tahun 2016 wisatawan mancanegara sebanyak 1.083 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 49.054 orang. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung mengalami peningkatan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa ekowisata mangrove tidak sesuai dengan karakteristik ekowisata sebagaimana teori yang disampaikan oleh Cooper C, Fletcher J, Fyall A, Gilbert D, Wanhill S. (2012) bahwa ekowisata bukan merupakan ekowisata massal (*mass tourism*). Demikian juga pendapat Nugroho (2011) yang menjelaskan jika jumlah pengunjung ekowisata tinggi maka akan mengganggu siklus hidup organisme, merusak habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. Padahal, tujuan dari ekowisata sendiri adalah mengembalikan fungsi hutan mangrove dan melestarikan lingkungannya. Namun, perubahan kawasan konservasi menjadi ekowisata ternyata menimbulkan penurunan kualitas lingkungan seperti kerusakan mangrove, menurunnya hasil tangkapan ikan dan berkurangnya spesies burung peksia (Rizal 2012).

Ekowisata merupakan upaya pemerintah menghadirkan konsep wisata tanpa mengabaikan lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam pengembangan ekowisata di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya). Pelibatan masyarakat dalam ekowisata akan memberikan dampak positif dari segi lingkungan dan ekonomi. Jika masyarakat lokal tidak dilibatkan, sumberdaya dipastikan akan rusak dan nilai jual kawasan beserta investasinya akan hilang (Fandeli 2011). Arah pengembangan permukiman nelayan di kawasan Pantai Timur Surabaya baik dari aspek keruangan, aspek lingkungan, nilai sosial-budaya dan kegiatan ekonomi nelayan dapat terintegrasi dengan baik yang dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui potensi kelautan. Ekowisata menjadi konsep yang menarik bagi para wisatawan karena menawarkan kegiatan wisata yang tidak biasa, karena diikuti dengan kegiatan-kegiatan konservasi dan juga pemberdayaan masyarakat lokal. Ekowisata yang merupakan tindak lanjut dari adanya pariwisata berkelanjutan masuk ke dalam agenda *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang dalam beberapa puluh tahun terakhir menjadi konsep pembangunan di negara-negara dunia karena

tumbuhnya kesadaran manusia bahwa alam mempunyai batas-batas untuk dimanfaatkan maupun di eksplorasi. Menurut Drexhage dan Murphy (2010) dikutip Winarno (2016) pembangunan berkelanjutan mempunyai arti mempertemukan kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan yang ada selama ini hanya menekankan aspek ekonomi, sehingga terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak sosial dan dampak lingkungan yang terjadi.

Ekowisata mangrove merupakan salah satu sumber yang mendapat perhatian di wilayah pesisir. Luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 75% dari total mangrove di Asia Tenggara sekitar 27% luas mangrove di dunia dengan tingkat keaneka ragam hayati yang sangat tinggi (<http://news.unair.ac.id>, diakses 5 Juni 2016). Tanaman mangrove berperan dalam melindungi garis pantai dari erosi, gelombang laut dan angin topan dan juga sebagai *buffer* (penyangga alam) dan menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Pesisir, bahwa wilayah pesisir terdiri atas sumber daya hayati seperti: ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan sebagainya; sumber daya nonhayati: pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan seperti misalnya: infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan lautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir (Dahuri 2010).

Pergeseran minat wisatawan dari *old-tourism* yaitu wisatawan yang hanya datang melakukan wisata saja tanpa ada unsur pendidikan dan konservasi menjadi *new-tourism* yaitu wisatawan yang datang untuk melakukan wisata yang di dalamnya ada unsur pendidikan dan konservasi ini sejalan dengan adanya pemanfaatan ekosistem mangrove untuk konsep wisata (ekowisata). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk mencari dan mengelola daerah tujuan ekowisata yang kaya akan keanekaragaman hayati dan spesifik alami dan serta dapat melestarikan lingkungan hidup (Rutana 2011). Secara berkelanjutan pembangunan wilayah pesisir dan laut merupakan kebijakan penting Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didasarkan pada pemikiran bahwa wilayah pesisir dan laut secara ekologis dan ekonomis potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan, pola pemanfaatan yang sifatnya merusak dan mengancam kelestarian sumberdaya pesisir dan laut masih saja terus berlangsung terjadi. Hal ini dikarenakan adanya desakan kebutuhan hidup, yang semakin lama semakin tinggi. Pengembangan ekonomi wisata (ekowisata) merupakan salah satu alternatif pembangunan yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut (Tuwo 2011).

Ekowisata merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang tujuannya untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya sertameningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat, juga memberi peluang bagi generasi muda sekarang dan yang akan datang untuk memanfaatkan dan mengembangkannya (UNESCO 2010; Sudiarta 2011). Ekowisata merupakan perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Eplerwood 2010). Hasil pertemuan dari anggota The International Ecotourism Society (TIES) pada tahun 2014 yang merupakan deklarasi Quebec menyebutkan ekowisata sebagai *sustainable tourism* yang secara spesifik memuat upaya upaya kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya; partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan dan operasional kegiatan wisata; terdapat transfer pengetahuan tentang warisan budaya dari alam kepada pengunjung.

Menurut Idajati (2015), penurunan kualitas lingkungan ekowisata disebabkan oleh pengelolaan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Berdasarkan data dari Status Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2011, yang menunjukkan bahwa lahan mangrove yang rusak sebesar 14.006 Ha. Kemudian Rizal (2012) juga menjelaskan bahwa kerusakan ekosistem mangrove terjadi karena adanya kesalahan pihak pengelola dan masyarakat dalam memilih bibit mangrove yang ditanam. Idajati (2015) juga menyebutkan bahwa pihak pengelola ekowisata hanya melakukan penanaman bibit mangrove tanpa adanya upaya untuk perawatan sehingga menyebabkan banyak mangrove yang mati.

Kota Surabaya memiliki kawasan wisata pantai edukatif dan menjadi daya tarik wisata yang beraneka ragam dan tidak sama dengan pantai satu dengan pantai yang lainnya karena adanya hamparan laut yang menenangkan sebagai tempat memancing, serta penghijauan dengan pohon mangrove sehingga menciptakan suasana nyaman bagi wisatawan yang berkunjung. Ekowisata mangrove Wonorejo merupakan salah satu kawasan pantai edukatif dan menarik untuk dikunjungi yang terletak di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya sangat berpotensi untuk dikembangkan dan harus disesuaikan dengan fungsi ekologisnya bagi Kota Surabaya, yaitu sebagai kawasan konservasi untuk melindungi Kota Surabaya dari banjir dan sebagai tempat pelestarian keanekaragaman hayati ekosistem mangrove yang merupakan habitat beragam satwa dan penyumbang hara bagi perairan pantai terdekat. Bagi warga di wilayah kawasan ekowisata mangrove Wonorejo menjadi denyut nadi ekonomi. Keuntungan ekonomis tersebut mereka dapatkan dari banyaknya pengunjung yang datang ke ekowisata ini, terutama setiap akhir pekan. Warga setempat mendapatkan penghasilan tambahan dari jasa perahu pada pintu masuk yang ditawarkan dan adanya warung-warung kecil yang berjejer di pinggir pesisir. Selain itu potensi lainnya yaitu akses jalan menuju kawasan wisata sudah menggunakan jalan aspal sehingga memudahkan wisatawan yang berkunjung.

Adapun beberapa masalah dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove Wonorejo ini yaitu bahwa kerusakan mangrove sudah parah bahkan ada beberapa pohon mangrove yang sudah besar tumbang dan akarnya terlihat jelas (beritasurabaya.net, diakses pada 12 Mei 2012). Masalah lainnya adalah dua hektar luas lahan mangrove di Surabaya rusak parah karena sampah (<https://www.beritasatu.com/nasional>, diakses 1 Juni 2015). Sementara itu, seorang petani tambak mengaku sering menemukan sampah-sampah yang berserakan dan melilit di batang mangrove di pinggir sungai (antaranews.com, diakses pada 16 Mei 2015). Adanya sampah tersebut selain berasal dari bawaan sungai Kali Jagir juga merupakan hasil dari pedagang ekowisata yang membuang sampah sisa jualan ke sungai setiap sore hari (Idajati 2015). Disamping itu juga, aktivitas ekowisata juga menyebabkan berkurangnya spesies burung Pekisia. Berdasarkan data pemerhati burung, bahwa jumlah spesies yang ada di mangrove Wonorejo mencapai 170 spesies, namun sekarang tinggal sekitar 70 hingga 80 spesies. Berkurangnya burung ini membuat meningkatnya populasi ulat bulu sehingga mangrove akan meranggas (antaranews.com, 16 Mei 2015). Hal ini juga diperkuat dengan tingginya angka kerusakan ekosistem mangrove Wonorejo yang rusak, sebagaimana tervisualisasikan dalam tabel di bawah ini berikut :

Tabel 1. Kondisi Mangrove di Kawasan Pamurbaya Tahun 2011

Kelurahan	Satuan dalam Ha			Total
	Baik	Rusak	Rusak Berat	
Gunung Anyar Tambak	52,398	10,099	0,98	63,477
Dukuh Suterejo	1,486	0	0	1,486
Kalisari	65,816	0	2,531	68,329
Kejawen Putih	28,257	0,176	0,028	28,462
Medoakan Ayu	69,028	0,508	0,867	70,404
Wonorejo	37,374	9,200	4,806	51,38
Keputih	117,843	11,498	21,037	150,378

Jumlah	372,202	31,481	30,231	433,916
--------	---------	--------	--------	---------

Sumber: Kajian Sosial Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kerusakan hutan mangrove di pesisir Wonorejo tinggi. Hal ini Nampak dari angka yang tertera dalam kolom rusak berat, kelurahan Wonorejo berada di posisi kedua setelah kelurahan Keputih. Sedangkan dalam kolom baik, kelurahan Wonorejo menempati posisi kelima dari tujuh lokasi penyebaran ekosistem mangrove di kota Surabaya. Kondisi ini menunjukkan, mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga Ekowisata Mangrove Wonorejo masih belum berdampak secara signifikan bagi kelestarian hutan mangrove Wonorejo. Melihat kondisi eksisting ini, tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja karena akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan ekowisata itu sendiri. Konsep ekowisata harus dikembalikan pada prinsipnya, yaitu memberikan edukasi, melestarikan karakteristik lingkungan, melibatkan masyarakat lokal dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal sehingga perlu adanya konsep pengelolaan ekowisata yang baik dan bertanggungjawab. Konsep ekowisata lebih baik jika dikembangkan lagi dengan konsep ekowisata berbasis masyarakat (*Community Based Ecotourism*) karena akan memiliki *multiplier effect* yang sangat luas dalam upaya mempertahankan kondisi lingkungan dari sisi ekologis namun tidak rnelupakan peningkatan perekonomian masyarakat lokal dari sisi ekonomi (Linberg, K. 2012).

Masyarakat Ekowisata (*The Ecotourism Society*), Wood (2012) menjelaskan bahwa ekowisata merupakan perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ekowisata dalam perspektif ini yaitu sebagai: (1) produk, semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam. (2) pasar, sebagai perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya kelestarian lingkungan dan (3) pendekatan pengembangan, sebagai metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan (Damanik 2011). Ekowisata (*ecotourism*) merupakan kegiatan wisata yang berhubungan dengan lingkungan secara keseluruhan. Pemerintah, pemilik modal dan masyarakat memiliki peranan penting untuk dapat melaksanakan kegiatan ekoturisme yang dapat digunakan sebagai alternatif solusi dalam memberikan kontribusi pendapatan, terutama bagi kawasan-kawasan lindung seperti hutan lindung, taman hutan rakyat maupun kawasan mangrove sekalipun.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara rinci tentang transparansi dalam interaksi antar domain *governance*, partisipasi masyarakat sipil, dan akuntabilitas masyarakat sipil dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Untuk membangun kemitraan yang efektif antar *domain governance*, dibutuhkan keterbukaan antar *stakeholder*, partisipasi masyarakat yang merata, serta akuntabilitas dari yang diberi amanah kepada si pemberi amanah. Adapun lokus penelitian ini adalah Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo yang dalam pengembangannya melibatkan peran serta pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah bahwa *evidence* dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo, telah menggambarkan perwujudan *good governance* melalui interaksi domain *governance* yang saling berbagi peran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi isu sentral di era globalisasi. Hal ini kemudian akan menjadi menarik, ketika kemunculan pengelolaan *bottom up* yang berdasarkan inisiatif masyarakat berkembang beriringan bersama dengan program pemerintah Mangrove Information Centre (MIC).

Metode Penelitian

Berdasarkan deskripsi dan fenomena tersebut di atas, maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini meliputi Dinas Pertanian Kota Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, PT. Pertamina (Persero) MOR V Surabaya dan kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo. Adapun

pertimbangan pemilihan lokasi penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1) Dinas Pertanian Kota Surabaya, tugas dan kewenangannya juga berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi kawasan pesisir yang mengalami kerusakan, yang dalam penelitian ini adalah ekosistem mangrove serta sebagai instansi yang berkewenangan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir, 2) PT. Pertamina (Persero) MOR V Surabaya dipilih karena perannya menjadi salah satu pihak yang melakukan pengembangan dan pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo melalui dana CSR nya, 3) Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo, sebagai subyek penelitian inti tempat pengelolaan ekosistem mangrove, dimana di dalam lokasi ini terjalin kemitraan dan koordinasi antar berbagai *stakeholder*, yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove.

Penelitian ini memfokuskan pada transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove Wonorejo Surabaya antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Materi yang dikaji dalam fokus penelitian ini adalah akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun 2013, 83).

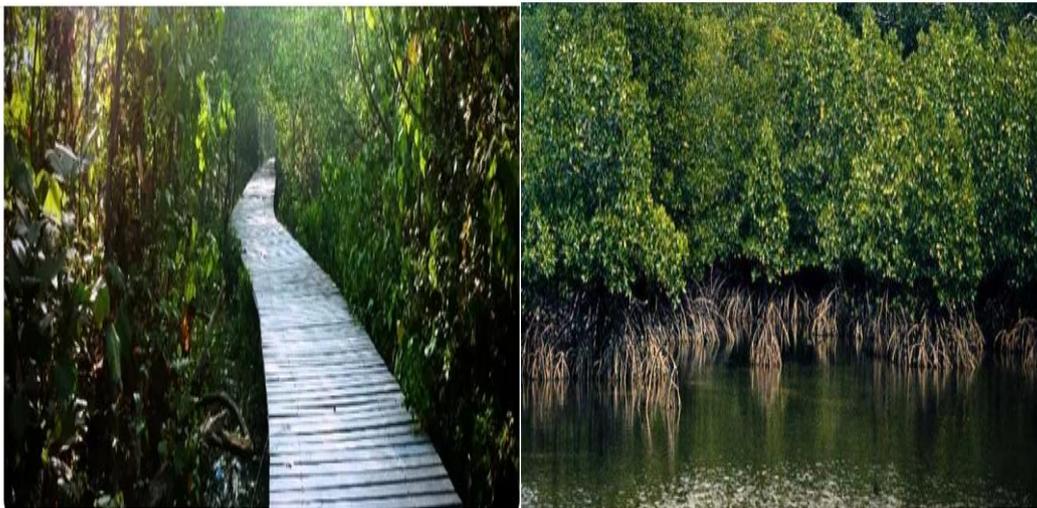
Teknik penetapan informan dilakukan secara purposif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam (*In-depth Interview*) dan pemanfaatan dokumen tertulis. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Adapun metode analisis data yang diperoleh akan diolah agar dapat disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pengolahan data untuk penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dari Huberman (2014).

Temuan dan Pembahasan: Sisi Historis Wilayah dan Hasil Penelitian

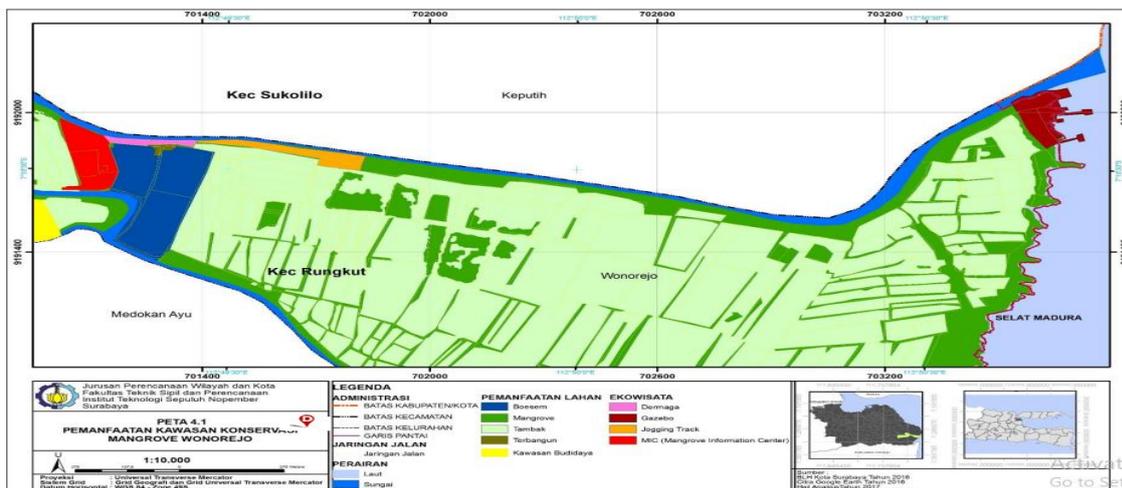
Seiring dengan berjalannya waktu, hutan mangrove di Pamurbaya mengalami penyusutan yang dapat menimbulkan marabahaya bagi masyarakat. Pada awalnya, Ekowisata Mangrove Wonorejo merupakan wilayah hutan bakau yang dengan luas kurang lebih 500 hektar. Bakau-bakau liar tak terawat itu tumbuh subur di pesisir timur milik warga Kelurahan Wonorejo. Pada tahun 2005 ada sekelompok warga melakukan pembalakan dengan menebang pohon-pohon bakau dalam skala besar karena dirasa tidak ada manfaatnya. Sejak peristiwa tersebut, mulai ada aksi nyata dari pegiat lingkungan di Surabaya. Sosialisasi kepada warga lokal tentang pentingnya pengelolaan hutan mangrove yang benar dilakukan baik secara informal maupun formal (LSM). Dalam sosialisasi tersebut seluruh warga lokal dihimbau agar aktif berpartisipasi dalam menjaga kawasan konservasi mangrove di daerahnya sendiri untuk meminimalisir kesalahan pengelolaan mangrove. Kemudian juga ada sosialisasi secara teknis mengenai kegiatan bercocok tanam, pembibitan, teknik perawatan dan teknik pembibitan. Hal ini juga didukung oleh petinggi Kelurahan Wonorejo dan Kecamatan Rungkut agar hutan bakau dapat terselamatkan. Bakau-bakau liar mulai ditata rapi sesuai dengan zona-zona bakau di perairan. Fatoni sebagai salah satu pengurus di kawasan konservasi Ekowisata Mangrove, kelompok petani tambak dan seluruh warga Wonorejo mulai mendapat kepercayaan diri kembali untuk mengubah cara pandang dan pola pikir yang salah. Musyawarah dan mufakat telah dicapai demi tujuan bersama meski ada aral melintang, seperti pertanyaan-pertanyaan klasik seputar nilai Rupiah, manfaat ekonomis dan masa depan mangrove. Pro dan kontra tersebut muncul dari beberapa kelompok masyarakat yang notabene berada dalam kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah.

Selanjutnya kawasan konservasi disahkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tahun 2007. Di samping itu, pemerintah juga mendirikan sebuah pos pantau di lokasi perbatasan antara lepas pantai dan hutan mangrove. Pos pantau tersebut berfungsi untuk memantau pertumbuhan bakau dan untuk menjaga keamanan pantai dari persinggahan sindikat perdagangan gelap di jalurlaut. Lahan konservasi mangrove semakin berkembang dan pada tahun 2009, masyarakat Kelurahan Wonorejo meraih prestasi dengan menjadi pemenang juara I Lomba antar kelurahan dengan pencapaian nilai tertinggi dari beberapa indikator seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban, lembaga kemasyarakatan, partisipasi aktif warga dan lain-lain. Hadiah yang diterima masyarakat Kelurahan Wonorejo sebagai wujud apresiasi pemerintah digunakan untuk membeli sebuah perahu baru, yang merupakan cikal bakal bagi warga Wonorejo untuk pendirian ekowisata mangrove di kemudian hari.

Gambar : Hutan Mangrove Wonorejo-Rungkut Kota Surabaya



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2017

Tepat pada hari peringatan mangrove sedunia tanggal 1 Juli, saat itu Lurah Wonorejo, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 556/157/436.11.15.5/2009 mengenai pendirian Ekowisata Mangrove Wonorejo Rungkut. Ekowisata mangrove ini digagas bersama oleh pihak Camat Rungkut, pihak Lurah Wonorejo dan dari Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nirwana Eksekutif. Selanjutnya tanggal 9 Agustus 2009, Bapak Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono turut hadir dalam proses peresmian Ekowisata

Mangrove Wonorejo. Dengan demikian pada tahun tersebut terbentuklah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Mangrove Wonorejo, yang Anggotanya adalah warga Wonorejo sendiri yang merasa tergerak untuk memajukan kawasan Ekowisata Mangrove. Pokdarwis terdiri dari Lembaga Ekowisata Mangrove, beberapa kelompok tani Wonorejo, paguyuban masyarakat tambak Wonorejo dan lain-lain.

Pemerintah kota Surabaya tidak hanya kaya wisata sejarah dengan bangunan sejarahnya, tetapi wisata alam di Surabaya, Jawa Timur juga patut diperhitungkan, yaitu ekowisata mangrove, Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur. Luas lahan lebih dari 800 hektar dan di kawasan ini terdapat 83 spesies burung eksotik langka seperti bambangan kuning, cangkak merah, perkutut Jawa, dan punai gading. Janis spesies tanaman yang hidup di mangrove ini adalah antara batas pasang dan surut sebuah kawasan pesisir dan lebih dari setengah jenis bakau yang ada di Indonesia tumbuh subur di sana. Ekowisata Mangrove Wonorejo secara administratif terletak di Jalan Wonorejo Nomor 1 Kecamatan Rungkut Surabaya yang merupakan salah satu dari empat lokasi kawasan hutan bakau (mangrove) yang terdapat di pesisir timur Surabaya. Lokasi konservasi dan ekowisata mangrove Wonorejo terletak berdekatan dengan area bosem atau waduk Wonorejo. Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah untuk menjadikan Pamurbaya sebagai kawasan konservasi mangrove.

Vegetasi asli yang tumbuh di daerah ini didominasi oleh bakau (*Rizophoramucronata*, api-api (*Avicennia alba*), pidada (*Sonneratiacaseolaris Rizophoraapiculata*), dan buta-buta (*Excoecariaagallocha*). Beberapa jenis tumbuhan lain juga ditemukan di kawasan ini seperti nipah (*nypafructicans*) dan ketapang (*terminalia catapa*). Selain itu juga terdapat tanaman sejenis bakau dan nonbakau introduksi (hasil kegiatan reboisasi), seperti tanjang (*bruguieragymnorrhiza*), nyamplung (*callophyluminophyllum*), warularut (*hibiscus tilliaceus*), bintaro (*cerberamanghas*), asem (*Tamarindus indica*), lamtoro (*Paraseriantesfalcataria*) dan akasia (*acacia auriculiformis*). Setiap tahun ditargetkan, dengan luas 10 hektar ditanami pohon mangrove 50 ribu batang.

Para pengunjung dapat menikmati wisatanya dengan nyaman karena pengelola setempat telah memberlakukan sistem paket untuk jalur wisata tersebut. Pengunjung untuk sampai kekawasan wisata mangrove harus menempuh perjalanan dengan jarak sekitar 5 km dari Jembatan Merr II-C yang ada di kawasan Perumahan Pondok Nirwana, Kedung Baruk atau kampus Stikom Surabaya. Kemudian, dari jembatan itu pengunjung berjalan kearah timur melewati IPH School, pangkalan taksi Orenz, hingga menemui penunjuk arah menuju EWM. Jarak tempuh dari titik tersebut hingga ke lokasi kira-kira 2,5 kilometer. Sedangkan untuk harga tiketnya sebesar Rp 25.000 bagi dewasa dan Rp 15.000 bagi anak-anak. Di kawasan tersebut juga sediakan fasilitas perahu dengan perjalanan pergi dan pulang selama 20 menit. Selang 20 menit selanjutnya perahu tersebut dengan silih berganti datang kembali. Hingga saat ini, wisata mangrove dibuka pada hari Sabtu dan Minggu juga hari libur dan buka mulai pukul 08.00-18.00 WIB. Untuk hari kerja, pengunjung harus menghubungi pihak pengelola wisata mangrove terlebih dahulu jika ingin melakukan kunjungan studi bagi pelajar. Pengunjung harus menyusuri muara Sungai Brantas dengan perahu untuk mengetahui kekayaan alam apa saja yang ada di Hutan Mangrove Wonorejo. Selain itu, pengunjung juga bisa menyewa *speed boat* dengan biaya sekitar Rp 300.000 untuk kapasitas 6 orang dan pengunjung akan didampingi oleh pemandu wisata setempat.

Hasil penelitian dari ketiga fokus ini adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sangat berhubungan erat antara satu dengan yang lain akan di deskripsikan sebagai berikut: Hasil kajian fokus pertama ini adalah transparansi yang tercipta dalam kemitraan pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo berarti adanya keterbukaan masing-masing aktor dalam mengkomunikasikan ide, data dan strategi dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan kawasan ekowisata. Melalui proses ini, keputusan yang diambil mampu mewakili kepentingan seluruh pihak sekaligus tanpa memberikan dampak

negatif terhadap ekosistem hutan mangrove. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan kemitraan yang bersinergi tanpa dominasi sebagian pihak adalah sebagai bagian dari transparansi, karena adanya keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Menurut Ratminto (2010, 208-209) salah satu pedoman pokok transparansi ialah menyediakan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat, memadai, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi dalam penelitian ini adalah bagaimana domain *governance* yakni Dinas Pertanian kota Surabaya, PT. Pertamina (Persero) MOR V Surabaya, Lembaga Ekowisata Mangrove Wonorejo, dan masyarakat Wonorejo dapat saling bertukar informasi akurat, berkomunikasi dan saling mengakui, menghormati kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak dalam kemitraan pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo, dimulai dari proses perencanaan hingga pelaporan capaian hasil kebijakan.

Sedangkan hasil kajian fokus kedua adalah partisipasi masyarakat sipil Wonorejo mempunyai peran besar dalam meminimalisir terjadinya kegagalan atau hambatan program penghijauan pemerintah kota Surabaya di kawasan pesisir Wonorejo. Sebagai masyarakat sipil, wajar apabila kemudian pemerintah kota Surabaya membuka peluang yang besar bagi mereka untuk berkontribusi dalam program lingkungan hidup ini. Peluang ini kemudian ditanggapi oleh masyarakat sipil dengan pendekatan ekonomi lingkungan yang kegiatan operasionalnya berkembang secara *bottom up* dengan digerakkan oleh kelompok masyarakat.

Transparansi interaksi antar domain *governance* dalam kemitraan pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo berupa dialog dan pertemuan masing-masing *stakeholder*, yang menunjukkan hasil bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki aksesibilitas dalam pelaksanaan kemitraan ini. Peluang partisipasi melalui aksesibilitas ini memudahkan masyarakat sipil untuk mengakses informasi berkaitan dengan hak-haknya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kemitraan pengelolaan kawasan ekowisata. Pengembangan ekowisata dengan melibatkan masyarakat lokal relatif mudah dilaksanakan karena memiliki beberapa keunikan : 1) jumlah wisatawan berskala kecil sehingga lebih mudah dikoordinir dan dampak yang ditimbulkan terhadap alam relatif kecil dibanding pariwisata massal, 2) ekowisata berbasis masyarakat lokal memiliki peluang dalam mengembangkan atraksi-atraksi wisata yang berskala kecil, mudah dikelola dan lebih mudah diterima masyarakat lokal 3) dengan peluang yang dimiliki masyarakat lokal dalam mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada di sekitarnya akan memberikan peluang lebih besar pula dalam partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, 4) memberikan pemahaman pentingnya keberlanjutan budaya (*cultural sustainability*) serta meningkatkan penghargaan wisatawan terhadap kebudayaan lokal.

Selanjutnya partisipasi masyarakat sipil yaitu yang berarti bahwa adanya ruang bagi individu maupun kelompok sosial yang terwakili oleh Lembaga Ekowisata Mangrove Wonorejo selaku pengelola dan masyarakat sekitar Ekowisata Mangrove Wonorejo untuk saling berinteraksi dan terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo juga mempunyai peran besar. Partisipasi masyarakat sipil dalam upaya memulihkan dan melestarikan hutan mangrove di pesisir Wonorejo melalui kegiatan ekowisata menunjukkan bahwa masyarakat lokal tersebut berperan serta dalam program pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu, yakni bersama *stakeholder* lainnya untuk memulihkan dan melestarikan hutan mangrove Wonorejo. Rahnema (1992) dikutip (Muluk 2007, 44-45) mendefinisikan partisipasi sebagai *“the action or fact of partaking, having or forming a part of”*. Dalam definisi ini, partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif. Partisipasi transitif berorientasi pada tujuan tertentu. Dan partisipasi bersifat intransitif apabila subjek tertentu berperan serta tanpa tujuan yang jelas.

Partisipasi masyarakat sipil Wonorejo dalam pengelolaan kawasan ekowisata bersifat transitif, sebagian besar dari mereka masih berorientasi pada ekonomi guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Di sinilah pentingnya keberadaan peran Lembaga Ekowisata Mangrove Wonorejo untuk mengarahkan dan mengorganisasi masyarakat melalui beragam kegiatan pemberdayaan dan pengawasan bersama, agar peduli terhadap potensi hutan mangrove di sekitarnya. Partisipasi dalam penelitian ini ialah sejauh mana keterlibatan masyarakat sipil Wonorejo dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo, mulai dari tahap identifikasi hingga evaluasi yang berorientasi pada pendekatan ekonomi guna mempengaruhi hal-hal yang menyangkut pembangunan diri, kehidupan, dan penghidupan mereka.

Hasil kajian pada fokus ketiga yang terkait dengan akuntabilitas masyarakat sipil Wonorejo dalam penyebarluasan informasi tentang suatu keputusan dan mekanisme yang menjamin bahwa standar telah terpenuhi. Akuntabilitas ialah bagaimana pertanggungjawaban masyarakat sipil selaku pemegang amanah publik yang melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan ekowisata mangrove Wonorejo untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada spektrum yang lebih luas, tidak hanya kepada pemerintah saja, berkaitan dengan kapasitas dan kualitasnya untuk mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan pengelolaan serta pengembangan ekowisata.

Aspek akuntabilitas juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam kemitraan pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo. Akuntabilitas publik merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Menurut Mahsun (2013, 83), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas masyarakat sipil sebagaimana dalam model *accountability downwards* terkait dengan konsep demokrasi partisipatif, yang dijelaskan bahwa aktivitas politik dan pelayanan publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif dan kemitraan antara wakil rakyat dan masyarakat di tingkat lokal.

Tidak hanya transparansi dan partisipasi, akuntabilitas juga memiliki peran dalam kemitraan pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo. Perlu diketahui bahwa masyarakat sipil merupakan pihak yang diberi kepercayaan oleh pemerintah kota Surabaya untuk mewadahi gerakan masyarakat dan memfasilitasi dunia usaha dalam melakukan penghijauan di pesisir Wonorejo melalui penanaman mangrove. Akuntabilitas masyarakat sipil yang bertanggung jawab mengelola kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo sebagai pemegang amanah *stakeholder* lainnya. Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam kemitraan pengelolaan kawasan ekowisata, membuat arah pengembangan ekowisata cenderung berorientasi pada aspek ekonomi dan sosial. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban entitas masyarakat sipil kepada masyarakat lokal yang secara historis telah berada di lokasi ekowisata, melalui beragam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan di lokasi ekowisata mangrove Wonorejo selain bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sipil juga bertujuan untuk memaksimalkan upaya pengawasan bersama terhadap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada ekosistem hutan mangrove Wonorejo oleh oknum yang tidak bertanggungjawab melalui tindakan pembalakan dan penebangan liar mangrove.

Berdasarkan berbagai manfaat yang diperoleh dalam pengembangan hutan wisata Mangrove Wonorejo Surabaya, yaitu: 1) fungsi keseimbangan masyarakat dalam mengelola kawasan agar mampu mandiri baik dari sisi *softskill* maupun kemandirian secara ekonomi, 2)

pengukuran daya dukung lingkungan mikroekosistem pantai dan lingkungan masyarakat lokal yang relatif dinamis agar tidak terjadi *overload* dalam pengelolaannya, yang akan berdampak pada kawasan itu sendiri, 3) pembatasan transportasi pribadi yang masuk ke zona inti hutan mangrove, karena dapat merusak kondisi jalan masuk dan mengganggu aktivitas satwa liar di sana. Suatu kesalahan bila keuntungan yang diserap dari kegiatan wisata alam tanpa melibatkan penduduk lokal karena mereka merupakan mitra dalam proses konservasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, perlu pendekatan yang komprehensif dalam pariwisata untuk dapat menggabungkan suatu komitmen yang kuat terhadap kelestarian alam serta tanggung jawab sosial ekonomi yang besar kepada masyarakat lokal.

Kesimpulan

Dialog dan pertemuan yang terpusat pada masyarakat sipil serta pelaksanaan kemitraan yang memberikan kemudahan akses pada setiap *stakeholder* sesuai dengan haknya merupakan bagian dari transparansi interaksi antar domain *governance* dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo dengan telah terlaksana *standard procedural requirements* yakni melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta *consultation processes*, dimana terdapat dialog antara pemerintah dengan *stakeholder*.

Partisipasi masyarakat sipil dalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove Wonorejo adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam kegiatan pengelolaan, untuk menciptakan rasa memiliki terhadap kegiatan pengelolaan bersama di bidang lingkungan hidup dan menjadikan kedudukan masyarakat sipil tidak hanya sebatas sebagai partisipan, melainkan sudah berada pada *level citizen participation*, masyarakat sipil berkedudukan sebagai subyek pengelolaan yang memiliki kuasa untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Selain itu juga, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembuatan keputusan, baik yang sifatnya teknis maupun nonteknis.

Kemudian berkaitan dengan akuntabilitas masyarakat sipil dalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove Wonorejo berupa penyebaran informasi kepada spektrum yang lebih luas, baik kepada pemerintah, maupun kepada masyarakat lokal, donatur, media massa hingga masyarakat luas. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo dengan mengaplikasikan aspek edukasi dan lingkungan masih terhambat oleh adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat sipil.

Referensi

- Cooper C, Fletcher J, Fyall A, Gilbert D, Wanhill S. 2012. *Tourism Principles and Practice*. Fourth Edition. ISBN 978-0-273-71126-1. United Kingdom (UK): FT Prentice Hall.
- Damanik, Janianto dan Weber, Helmut. 2011. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi.
- Dahuri, R. 2010. *Keanekaragaman hayati laut. Aset pembangunan berkelanjutan Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Eplerwood, M. 2010. *Ecotourism : Principles, Practices & Policies for Sustainability*. United Nations Environment Programme Division of Technology, Industry and Economics, France.
- Fandeli, Chafid. 2011. *Perencanaan Pariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.

- Idajati, Hertiari, A. P. 2015. The level of participation in Mangrove ecotourism development, Wonorejo Surabaya. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 515 - 520.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF.
- Huberman's, A. M., Milles, M. B., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, a Methods Sourcebook*. SAGE.
- Muluk, Khairul. 2011. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berfikir Sistem)* Malang, Bayumedia, Publishing.
- Nugroho, I. 2011. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Malang: Pustaka Pelajar.
- Rizal, V. 2012. *Pergerakan LSM Nol Sampah dalam mengawal politik hijau kota Surabaya (studi kasus: pendampingan petani lokal pohon mangrove di bosemwonorejosurabaya)*. Valihudin Rizal.
- Ratminto dan Winarsih Atik Septi. 2010. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model*.
- Rutana, F, F. 2011. *Studi Kesusaian Ekosistem, Mangrove sebagai Objek Ekowisata di Pulau Kapota Taman Nasional Wakatobi Sulawesi Tenggara*. Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Laziem, Syarful, M. B. 2015. *Perancangan Media Promosi Ekowisata Mangrove Wonorejo Sebagai Upaya Meningkatkan Brand-Awareness*. Desain Komunikasi Visual.
- Satria, Dias. 2010. *Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang*. Volume 3, No 1. Mei 2010.
- Tuwo, A. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan laut Pendekatan Ekologi, Sosial Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah*. Sidoarjo: Brilian Internasional.
- TIES. 2014. *The International Ecotourism Society*. Ecolodge.
- Winarno, S. 2016. *Strategi Pengelolaan Mangrove Melalui Analisis Tingkat Kerusakan (Studi Kasus: Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan)* (Doctoral Dissertation, IPB (Bogor Agricultural University)).
- Wood, M. E. (2012). *Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability*. France: United Nation Publication.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Pesisir*.
- Yoeti, Oka A. 2016. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Balai Pustaka, Jakarta.